



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BULELENG  
DENGAN  
REKTOR UNIVERSITAS WARMADEWA, BALI  
TENTANG**

**BIMBINGAN TEKNIS BAGI ANGGOTA DPRD KABUPATEN BULELENG**

**Nomor: 090/2399/2018**

**Nomor: 6020/Unwar/PD-15/XII/2018**

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Kampus Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **Drs. Dewa Ketut Manuaba** selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng, yang berkedudukan di Jalan Veteran No. 2 Buleleng - Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK** selaku Rektor Universitas Warmadewa, Denpasar Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan melakukan perjanjian kerjasama Bimbingan teknis (Bimtek) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2018, yang selanjutnya dituangkan kedalam suatu PERJANJIAN KERJASAMA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat mengadakan perjanjian kerjasama yang diatur sebagai berikut :

**PASAL 1  
Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud dari perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan hukum dalam rangka pelaksanaan kerjasama PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup kesepakatan ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk saling mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam mengoptimalkan kemampuan dan pelaksanaan program kerjasama dimaksud.

**PASAL 2  
Ruang Lingkup Perjanjian**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Tempat Pelaksanaan Bimbingan Teknis;
- b. Materi ;
- c. Pembicara ;
- d. Metode ;
- e. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan ;

- f. Konsumsi ;
- g. Sertifikat

### PASAL 3 Pelaksanaan Kegiatan

- (1) PIHAK PERTAMA, melalui Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng berkewajiban untuk :
- a. Mengadakan Pembahasan Rancangan Perjanjian Kerja Sama dengan PIHAK KEDUA yang waktu dan tempat diatur oleh kedua belah pihak.
  - b. Mengirimkan Para Peserta Bimbingan Teknis/workshop dari unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buleleng, sebagaimana Surat Perintah Terlampir.
  - c. Melakukan koordinasi dengan PARA PIHAK dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
  - d. Membayar Biaya Kontribusi untuk masing-masing peserta sebesar Rp 5.500.000,00 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (2) PIHAK KEDUA, berkewajiban
- a. Bersedia wajib menyediakan calon narasumber sesuai kompetensi, bidang dan keahliannya terkait dengan Tema Bimbingan Teknis/workshop yang dilaksanakan.
  - b. Melakukan koordinasi terhadap segala hal yang berkenaan dengan Bimbingan Teknis/Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buleleng dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng.
  - c. Bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA dan instansi terkait dalam upaya melakukan pemecahan dan penyelesaian masalah terhadap bimbingan teknis/bimtek Anggota DPRD Kabupaten Buleleng serta menentukan waktu pelaksanaan.
  - d. Mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengikat kedalam organisasi Pemerintah Kabupaten Buleleng, serta bermaksud untuk menjadikan hasil Bimbingan Teknis/Workshop sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka mewujudkan Tri Fungsi DPRD.
  - e. Menyiapkan konsumsi bimbingan teknis/workshop yang representatif, modul materi bimtek, narasumber dan moderator, metode pembelajaran, sertifikat dan kwitansi pertanggungjawaban pengeluaran keuangan bagi masing-masing peserta bimtek.
  - f. Sertifikat sebagaimana dimaksud huruf e, penyelesaian administrasinya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, pada halaman depan ditandatangani oleh Rektor dan pada Halaman Belakang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng dan PIHAK KEDUA (Ketua Panitia Penyelenggara)
  - g. PIHAK KEDUA wajib menerima Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (monev) yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
  - h. Segala biaya yang diakibatkan oleh Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (monev) sebagaimana dimaksud pada huruf g diatas, dibebankan pada PIHAK KEDUA.

### PASAL 4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu dan tempat penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buleleng akan disepakati bersama pada setiap kegiatan dan akan disampaikan koordinasi setiap penyelenggaraan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya

PASAL 5  
Materi

Materi Bimbingan Teknis (Bimtek) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buleleng akan disepakati bersama setiap kegiatan sesuai dengan kebutuhan.

PASAL 6  
Metode Pembelajaran

Metode Pembelajaran Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ceramah, Diskusi dan Tanya Jawab.

PASAL 7  
Pembiayaan

- (1) Segala biaya yang ditimbulkan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Pos Kegiatan Bimtek/Workshop/Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota DPRD Kabupaten Buleleng.
- (2) Tata Cara pembayaran kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dibayarkan dimuka melalui transfer rekening dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Apabila peserta mulai dilaksanakan bimbingan teknis sampai berakhirnya pelaksanaan bimbingan teknis tidak hadir dan uang kontribusi oleh PIHAK PERTAMA telah ditransfer/disetor kepada PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan uang kontribusi tersebut sebesar Rp 5.500.000,00 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per peserta kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) Apabila peserta bimbingan teknis tidak mengikuti bimbingan teknis satu hari, maka kontribusi dipotong Rp 500.000,00 dan begitu seterusnya.

PASAL 8  
Masa Berlaku

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku mulai 3 Desember Tahun 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember Tahun 2018 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 9  
Perselisihan

- (1) Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili penyelesaian di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar

PASAL 10  
Addendum

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK dan dituangkan dalam perjanjian Kerjasama Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;

(2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing asli dan sama bunyinya, di atas materai secukupnya, mempunyai kekuatan hukum yang sama, berlaku setelah ditandatangani dan membubuhkan cap/stempel.

**PIHAK KEDUA**  
**UNIVERSITAS WARMADEWA**  
**REKTOR**

Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.Park  
NIK : 230 800 260



**PIHAK PERTAMA**  
**SEKRETARIS DPRD**  
**BUPATEN BULELENG**



Drs. Dewa Ketut Manuaba  
NIP. 095911231986 03 1 014